

---

---

## MODEL STRATEGIS PENGEMBANGAN USAHA KECIL PERKOTAAN (Kasus pada Usaha Mikro dan Kecil Pangan di Kota Palembang)

**M. Syahirman Yusi**

Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya

email: [msyusi@gmail.com](mailto:msyusi@gmail.com)

### Abstract

*This study was intended to formulate the model of micro and small scale of food enterprise in Palembang by determining both the level and the influencing factors business climate, development and training, business technology, competitive advantage strategy, business self reliance, business progress, and business continuity. Survey and interview technique were implemented among 100 samples. Data was analyzed by using both one way anova test and structural equation modeling. The result indicated that business climate, development and training, business technology had a positive influence toward the competitive advantage strategy and business self reliance. Competitive advantage strategy had a positive influence toward the business self reliance and business progress, and business progress had a positive influence toward the business continuity. Those above results analysis indicated that all of the proposed research hypothesis and theoretical model were not rejected.*

**Keywords:** *micro and small enterprise, development, strategic*

### Pendahuluan

Pada pasca krisis tahun 1997, usaha mikro dan kecil (UMK) dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMK mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UMK setiap tahunnya. Pada tahun 2005 jumlah unit UMK sebanyak 47,1 juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia, pada tahun 2011 jumlah UMK meningkat menjadi sebanyak 55,2 juta unit. Seiring dengan peningkatan jumlah usaha UMK, maka turut meningkat jumlah tenaga kerja yang diserap. Pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja yang diserap UMK sebanyak 83,2 juta jiwa kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi sebanyak 98,9 juta jiwa. UMK menyerap 94,52 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012). Walaupun belum memberikan kontribusi maksimal pada perkembangan pendapatan nasional secara keseluruhan, posisi tersebut menunjukkan bahwa UMK berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak perekonomian negara, oleh karena itu keberadaan UMK patut untuk senantiasa diberdayakan.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang penting pemberdayaan usaha mikro dan kecil (Berry, *et.al.*, 2001). *Pertama*, adalah kinerja usaha mikro dan kecil cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamika, usaha mikro dan kecil sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga*, adalah karena sering diyakini bahwa usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Usaha mikro dan kecil (UMK) pangan yang merupakan topik penelitian cukup berkembang di kota Palembang. Dengan potensi yang ada dan didukung oleh tersedianya sumber daya lokal, UMK pangan ini cukup memberikan arti bagi perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Dari keseluruhan usaha UMK pangan yang ada di Kota Palembang yang berjumlah 499 unit dengan nilai investasi Rp 7.346.384.000 dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 3.485 orang, persentase jumlah UMK kecil pangan cukup memberikan arti bagi pertumbuhan ekonomi daerah (BPS Kota Palembang, 2005).

Meskipun dalam prakteknya kebijakan pemerintah bagi pengembangan UMK ini telah dilakukan, namun pada kenyataannya masih banyak masalah baik internal maupun eksternal yang dihadapi belum sepenuhnya teratasi. Akibatnya keberadaan UMK pangan ini belum

optimal memberikan kontribusinya pada perkembangan ekonomi daerah, baik terserapnya tenaga kerja, investasi yang ditanamkan, maupun sumbangan terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD). Iklim usaha yang mendukung perkembangan belum sepenuhnya dirasakan oleh pengusaha. Beberapa aspek seperti: pendanaan, persaingan, prasarana usaha, informasi bisnis, perizinan usaha, dan perlindungan usaha belum banyak memberikan arti yang signifikan bagi perkembangan usaha. Padahal penciptaan iklim usaha yang kondusif akan banyak memberikan arti bagi laju dan berkembangnya usaha kecil (Tambunan, 2002).

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha kecil ini, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Sedangkan semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru. Keterbatasan sumber daya manusia ini menjadi salah satu ancaman serius bagi UMK Indonesia untuk dapat bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional di dalam era perdagangan bebas nanti; bahkan di masa itu sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi akan menjadi lebih penting dibandingkan modal sebagai faktor penentu utama kemampuan UMK untuk meningkatkan daya saing globalnya.

Sering dikatakan bahwa untuk menanggulangi masalah sumber daya manusia ini, memberikan pelatihan langsung kepada pengusaha sangat penting dan ini merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. Akan tetapi pengusaha kadang tidak sanggup menanggung sendiri biaya pelatihan. Memang selama ini sudah banyak pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha, terutama dari Kemnakerkop & UKM, Kemperindag, dan Kemnaker. Hanya saja efektivitasnya masih diragukan. Karena banyak pengusaha yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dari pemerintah mengeluh bahwa pelatihan-pelatihan tersebut sering bersifat terlalu teoritis, waktunya terlalu singkat, tidak ada tindak lanjut, dan sering kali tidak cocok dengan kebutuhan mereka sebenarnya.

Penguasaan teknologi merupakan faktor penting dalam sumber daya fisik yang mempunyai pengaruh signifikan dalam mencapai keunggulan usaha. Plotkin (Yusi dan Zahri, 2006) menyatakan, penerapan teknologi maju dalam proses produksi akan sangat membantu keberhasilan usaha kecil. Sebaliknya keterbelakangan teknologi tidak hanya membuat rendahnya produktivitas total dan efisiensi dalam produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, pengembangan UMK ini memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Iklim usaha yang kondusif, sumber daya manusia yang mempunyai keahlian, keterampilan, dan motivasi tinggi, teknologi maju yang mendukung dapat menghasilkan kompetensi inti dalam perusahaan. Kompetensi inti akan menghasilkan keunggulan bersaing.

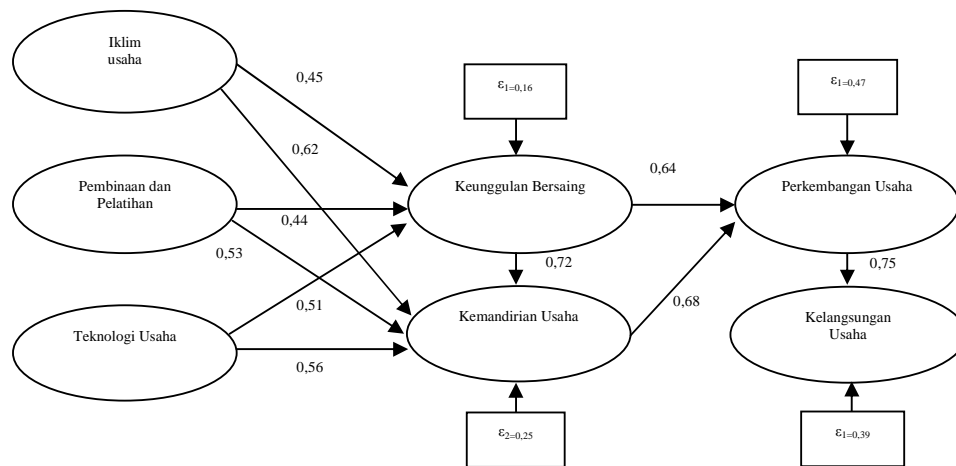
Keunggulan bersaing pada umumnya mempunyai dua dasar utama, yaitu biaya rendah dan diferensiasi, di mana keduanya dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatannya secara lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Kedua jenis variabel dari keunggulan bersaing yang digabungkan dalam cakupan aktivitas yang hendak dicapai oleh perusahaan akan menghasilkan tiga strategi generik yang berguna untuk mencapai kinerja di atas rata-rata. Ketiga strategi generik itu adalah: strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Suatu perusahaan yang mempunyai keunggulan dalam bersaing akan mempunyai dampak positif pada kemandirian usaha, berupaya secara gigih melakukan kombinasi dari sumber daya ekonomi yang tersedia, mampu menciptakan produk dan teknik usaha baru, mampu mencari peluang baru, bekerja dengan metode kerja yang lebih efektif dan efisien, cepat mengambil keputusan dan berani mengambil resiko (Utami, *et.al.*, 2006). Selanjutnya kondisi ini akan berpengaruh pada perkembangan usaha berupa peningkatan omset penjualan, peningkatan aset usaha, dan kepastian pasar (Yusi dan Zahri, 2006), dan lebih lanjut usaha tersebut akan mempunyai kontinuitas dalam berusaha, mampu mengatasi setiap fluktuasi bisnis, peningkatan skala usaha, serta mampu bersaing dengan produk usaha besar dan impor.

**Bahan dan Metode**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMK pangan di Kota Palembang. Sampel diambil dengan metode *stratified random sampling*, dengan strata unit usaha potensial. Dari delapan kecamatan yang memiliki sentra UMK di Kota Palembang terpilih Kecamatan Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II yang memiliki unit usaha terbesar di antara kecamatan-kecamatan yang ada lainnya. Jumlah sampel ditetapkan 100 pengusaha, dengan perincian 60 pengusaha di Kecamatan Seberang Ulu I dan 40 pengusaha di Kecamatan Seberang Ulu II. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2013 sampai Juni 2013. Data primer diperoleh dengan mendatangi dan melakukan wawancara terhadap responden dengan berpedoman pada kuesioner yang kemudian akan diklarifikasi dengan wawancara mendalam. Data dianalisis dengan menggunakan analisis uji beda rata-rata anova dan *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menguji hipotesis dan mengkonfirmasi model teoritis yang dibentuk.

**Hasil dan Pembahasan**

Data hasil penelitian disajikan dalam SPSS dengan menggunakan program LISREL 8.50 dengan sumber data SPSS yang telah disiapkan, komputasi akan menghasilkan *standardized estimates measurement model confirmatory factor analysis* dari data yang disajikan tersebut. Hubungan antara variabel penyebab dan variabel akibat yang menunjukkan adanya total pengaruh dari masing-masing variabel yang terdapat dalam model sebagaimana digambarkan dalam paradigma penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1  
 Diagram Jalur Model Persamaan Struktural antar Variabel Penelitian

Hasil dari perhitungan dengan SEM Analysis dari Gambar 1 di atas terlihat, bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim usaha ( $X_1$ ) terhadap keunggulan bersaing ( $X_4$ ) artinya hipotesis diterima. Pengaruh langsung iklim usaha terhadap keunggulan bersaing sebesar 0,45. Di samping itu, iklim usaha juga berpengaruh positif terhadap kemandirian usaha ( $X_5$ ), yaitu sebesar 0,62, pengaruh ini cukup kuat. Ini berarti iklim usaha berperan aktif dalam menumbuhkan keunggulan bersaing dan kemandirian UMK. Temuan di atas sejalan dengan pendapat Hill (1995) dan Mubyarto (1997) yang menyatakan bahwa kunci utama untuk membuat usaha kecil menjadi efisien dan dinamik adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa membuat UMK terus bergantung pada bantuan khusus pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin konsisten pemerintah membangun iklim usaha yang kondusif, seperti misalnya penetapan peraturan yang menunjang kemudahan di bidang pendanaan, mengkoordinasi pengusaha dalam organisasi yang dapat memperkuat daya saing, penyediaan informasi bisnis bagi perkembangan usaha, penyederhanaan peraturan di bidang perizinan, mengadakan perlindungan usaha, baik dalam bentuk peruntukan tempat usaha ataupun bantuan

konsultasi hukum dan pembelaan, dan lain-lain maka akan semakin mudah bagi UMK dalam memperkuat aktivitas usahanya.

Pembinaan dan pelatihan usaha ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing ( $X_4$ ) dengan koefisien pengaruh sebesar 0,44 dan 0,53 terhadap kemandirian usaha ( $X_5$ ), walaupun nilai pengaruh tidak begitu besar tetapi dari perhitungan di atas memberi indikasi bahwa pembinaan dan pelatihan yang diberikan mempunyai peran dalam penguatan keunggulan bersaing dan kemandirian usaha. Hasil ini menunjukkan ada kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhargava (1996) di India, Hu dan Schive (1996) di Taiwan, maupun Adachi (1997) di Jepang yang menekankan betapa pentingnya campur tangan pemerintah baik dalam bentuk pembinaan dan pelatihan yang kontinyu bagi pekerja dan pengusaha dalam memajukan usaha kecil, termasuk di dalamnya adalah kebijakan teknologi (riset dan pengembangan), keuangan, dan kebijakan industrialisasi yang cepat.

Teknologi usaha ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing ( $X_4$ ) dengan koefisien pengaruh sebesar 0,51 dan 0,56 terhadap kemandirian usaha ( $X_5$ ), dari perhitungan di atas memberi indikasi bahwa teknologi yang digunakan mempunyai peran dalam penguatan keunggulan bersaing dan kemandirian usaha. Hasil ini menunjukkan ada kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Plotkin (Yusi dan Zahri, 2006) menyatakan, penerapan teknologi maju dalam proses produksi akan sangat membantu keberhasilan usaha kecil. Sebaliknya keterbelakangan teknologi tidak hanya membuat rendahnya produktivitas total dan efisiensi dalam produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dihasilkan.

Keunggulan bersaing ( $X_4$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian usaha ( $X_5$ ) dengan koefisien pengaruh sebesar 0,72 dan 0,64 terhadap perkembangan usaha ( $X_6$ ), dari perhitungan di atas memberi indikasi bahwa keunggulan bersaing dengan dua dasar utama, yaitu biaya rendah dan diferensiasi, mempunyai peran dalam kemandirian dan perkembangan usaha yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan teori Porter (2001) menyatakan, bahwa untuk menciptakan daya saing perusahaan harus menciptakan keunggulan melalui strategi generik, yaitu strategi yang menekankan pada keunggulan biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Dengan strategi ini, perusahaan akan memiliki daya tahan hidup (*survive*) secara berkesinambungan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Kemandirian usaha ( $X_5$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha ( $X_6$ ) dengan koefisien pengaruh sebesar 0,68. Hasil perhitungan di atas memberi indikasi bahwa kemandirian usaha yang dicirikan dengan adanya kemampuan wirausaha sendiri tanpa ketergantungan penuh dengan pihak lain mempunyai peran dalam perkembangan usaha. Pada akhirnya perkembangan usaha ( $X_6$ ) mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kelangsungan usaha ( $X_7$ ), dengan koefisien pengaruh sebesar 0,75.

Dari analisis di atas terlihat betapa pentingnya penguatan lingkungan internal bila diterapkan dalam memberdayakan UMK, khususnya di daerah penelitian. Dalam konsep ini perhatian harus ditekankan pada penciptaan nilai tambah untuk meraih keunggulan daya saing (*competitive advantages*) melalui pengembangan kapabilitas khusus (kewirausahaan), sehingga UMK tidak lagi mengandalkan strategi kekuatan pasar melalui fasilitas monopoli dan fasilitas pemerintah. Dalam strategi ini diharapkan UMK dapat mengarahkan pada keahlian secara internal yang dapat menciptakan produk inti yang unggul untuk memperbesar pangsa produksi. Strategi tersebut lebih murah dan ampuh dalam mengembangkan UMK, karena UMK dapat memanfaatkan sumber daya lokal. Konsep tersebut sejalan dengan pendapat Tambunan (2002) yang menyatakan bahwa lingkungan eksternal dan internal perusahaan harus mendukung yang mencakup banyak aspek, mulai dari iklim usaha yang kondusif, sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, budaya bisnis, sistem manajemen, jaringan bisnis, hingga tingkat *entrepreneurship*.

Uji kesesuaian (*goodness of fit indices*) dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan telah memenuhi persyaratan analisis. Dari hasil uji model penelitian nampak pada Tabel 1.

Tabel 1  
Uji Kesesuaian (*Goodness of Fit Indices*) Overall Model

<i>Goodnes of fit Index</i>	<i>Cut off Value</i>	Hasil Model	Keterangan
$\chi^2$ - <i>Chi square</i>		14.084	Baik
Derajat bebas, df		9	Diterima
<i>Significance Probability</i>	$\geq 0.05$	0	Diterima
<i>RMSEA</i>	$\leq 0.08$	0.055	Diterima
<i>GFA</i>	$\geq 0.90$	0.916	Diterima
<i>AGFI</i>	$\geq 0.90$	0.921	Diterima
<i>CMIN/DF</i>	$\leq 2.00$	1.426	Diterima
<i>TLI</i>	$\geq 0.95$	0.958	Diterima
<i>CFI</i>	$\geq 0.95$	0.962	Diterima

Dari hasil uji kesesuaian dalam tabel di atas terlihat bahwa ternyata model analisis dapat diterima atau dapat dikatakan memiliki sebuah makna tertentu yang disebut *unidimensionality* atau fenomena yang unidimensi sebagai suatu konsep baru yang telah teruji secara faktual berdasarkan data empiris.

Secara sederhana dapat dikatakan agar suatu perusahaan dapat bersaing baik di pasar domestik maupun ekspor selain lingkungan eksternal, lingkungan internal dalam perusahaan harus mendukung. Pengalaman Indonesia selama 30 tahun kebelakang terutama pada masa resesi ekonomi 1997, memberikan informasi dan sekaligus pelajaran berharga bahwa, pada masa lalu runtuhnya perekonomian Indonesia ternyata sebagai akibat dari ketidakmampuan pengambil keputusan di pemerintahan Indonesia saat itu dalam merespon berbagai isu kritis akan pentingnya menumbuhkembangkan ekonomi skala kecil. Pada saat itu perekonomian Indonesia hanya bertumpu pada bebertapa usaha skala besar (konglomerat). Oleh karena itu respon yang cepat dan tepat terhadap ekonomi rakyat (skala mikro dan kecil) akan sangat bermanfaat bagi kemungkinan ketahanan dan sekaligus keamanan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Iklim usaha lebih menunjuk pada kehendak politis (*political will*) dari negara untuk mendorong proses kelangsungan UMK yang secara praktis harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*). Iklim usaha merupakan suatu situasi eksternal yang memberikan lingkungan yang mendukung kegiatan UMK. Lingkungan usaha yang mendukung mempunyai arti terdapat ruang gerak yang luas dan leluasa dan dimudahkan bagi setiap pelaku usaha. Lingkungan yang mendukung juga berarti dikurangnya atau ditiadakannya hambatan-hambatan yang tidak perlu yang menghalang-halangi UMK untuk melakukan kegiatannya. Dalam konteks ini peranan pemerintah menjadi penting dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung tersebut dengan membuat kebijakan atau peraturan yang menunjang ke arah pertumbuhan dan perkembangan UMK berupa regulasi dan deregulasi peraturan yang mendukung perkembangan UMK, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal.

Regulasi dan deregulasi menyangkut perintah untuk mengeluarkan suatu peraturan tertentu yang bersifat memudahkan UMK dalam melakukan usahanya. Adanya peraturan yang dirancang untuk mendorong UMK saling bermitra antara satu dengan yang lainnya. Regulasi tidak berarti pemaksaan, tetapi juga dapat bersifat insentif bagi mereka yang melakukan. Misalnya ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengharuskan usaha besar bisnis eceran (*hypermarket*) untuk menyediakan sebagian dari ruangnya diperuntukkan bagi UMK untuk berdagang di lokasi *hypermarket*. Deregulasi adalah menyederhanakan atau meniadakan peraturan-peraturan yang menghambat atau menghalangi kegiatan UMK. Misalnya berbagai bentuk prosedur dan perizinan yang rumit, panjang, memakan waktu, dan berbiaya tinggi. Hal semacam ini harus semaksimal mungkin dilakukan penyerderhanaan perizinan dan pemangkasan birokrasi. Perintah undang-undang untuk hal ini sangat penting terutama pada

masa otonomi daerah yang kini berlomba-lomba membuat Peraturan Daerah (Perda), yang sering kali bersifat distortif pada kegiatan ekonomi secara nasional. Perlu dicatat bahwa Perda mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi dari Keputusan Menteri, sehingga peraturan yang dibuat oleh menteri tidak akan berlaku apabila bertentangan dengan Perda. Undang-undang tentu saja kedudukannya lebih tinggi dari Perda, sehingga konflik kewenangan akan dapat dihindari.

Adanya perintah dari undang-undang di bidang moneter agar kegiatan UMK didukung oleh sistem keuangan yang memadai. Misalnya didukung oleh adanya sumber pendanaan yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan usaha, adanya suatu lembaga keuangan yang berfungsi dalam penyalurannya, ada mekanisme penjaminan dan bahkan asuransinya. Bahkan bagi usaha-usaha pemula disediakan skim khusus untuk mendukung usahanya, dan sumbernya tidak semata-mata dari perbankan tetapi dari anggaran pemerintah yang disalurkan melalui berbagai bentuk lembaga keuangan baik bank maupun nonbank. Lembaga keuangan bank juga diberikan insentif khusus bagi mereka yang melayani usaha kecil. Sejalan dengan itu dibentuk pula lembaga penjaminan yang dimaksudkan untuk membantu kolateral UMK yang usahanya layak dan berkembang, tetapi tidak dapat mengakses sumber keuangan karena keterbatasan agunan yang dimiliki.

Di bidang fiskal adalah perintah undang-undang tentang adanya anggaran pemerintah yang dialokasikan guna mendorong atau memberdayakan pelaku usaha sehingga mempunyai kemampuan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Anggaran pemerintah yang disediakan secara khusus guna mendorong kegiatan usaha kecil sangat minim. Umumnya menjadi bagian dari kegiatan lain yang kebetulan mempunyai dampak membantu, misalnya anggaran untuk pelatihan sumber daya manusia (SDM). Kedepan tentu sangat diperlukan kegiatan yang terencana untuk maksud ini. Terdapat beberapa bentuk yang dapat direkomendasikan, misalnya untuk pelatihan SDM, penyediaan informasi usaha, modernisasi dan perbaikan teknologi, konsultasi usaha, promosi pasar. Anggaran untuk program ini semestinya tidak hanya oleh pemerintah pusat, terlebih lagi adalah sangat penting bagi pemerintah daerah secara khusus menganggarkannya. Hal ini berkaitan pula bahwa kewenangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan kegiatan operasional di lapangan sudah sangat terbatas. Tanpa keterlibatan dari pemerintah daerah secara memadai tentu perkembangannya menjadi sangat lamban.

Pembinaan dan pelatihan juga merupakan aspek penting bagi perkembangan UMK. Soewardi (2001), menyatakan perlunya pembinaan dan pelatihan karena dengan pembinaan dan pelatihan dapat meningkatkan kinerja, baik dalam bidang produksi maupun pemasaran, dimensi sikap, persepsi dan tingkah laku. Soewardi mensinyalir sebagian besar pengusaha UMK kurang dalam motivasi, lemah dalam karsanya, respon mereka lamban untuk berproduksi sesuai permintaan, bila permintaan meningkat, produksi mereka tidak serta merta naik. Oleh karena itu, temuan penelitian mendukung pendapat para ahli betapa perlunya pembinaan dan pelatihan yang kontinyu dan sesuai dengan kebutuhan UMK dalam memperkuat lingkungan internal perusahaan. Dalam situasi yang masih terbatas, baik dalam bidang produksi yang sifat produknya masih konvensional, bidang pemasaran yang kadang tidak menjamin kontinuitas produk yang dipasarkan, maupun sumber daya manusia yang dalam banyak hal masih perlu ditingkatkan tingkat pengetahuan dan wawasannya, pembinaan dan pelatihan mutlak perlu diberikan agar terjadi peningkatan dalam bidang-bidang dimaksud.

Teknologi yang digunakan UMK di daerah penelitian juga masih sangat beragam dan belum mengalami pengembangan yang dapat membuat produk terstandarisasi. Dalam menghasilkan satu produk yang sama kadang digunakan teknologi yang berbeda sehingga mutu produk sangat beragam. Dalam praktek perdagangan, keragaman mutu yang tinggi merupakan faktor pembentuk ketidakpastian pasar sehingga menghambat penguasaan dan perluasan pasar. Kaitannya dengan UMK, rendahnya teknologi yang digunakan disebabkan oleh terbatasnya faktor pendanaan, kesempatan dalam memperbaiki teknologi dan terbatasnya kesempatan mencoba teknologi yang terbaru.

Kemitraan merupakan suatu jawaban untuk meningkatkan kesempatan berkiprahnya UMK dalam percaturan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dalam kemitraan usaha menengah atau

besar diharapkan dapat berperan dengan melakukan alih teknologi dan pengetahuan serta kemampuan manajerial usaha kepada UMK. Dengan demikian akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia UMK sehingga menjadi lebih mandiri dan profesional. Di samping itu peran usaha menengah dan besar sangat diharapkan dapat membantu permodalan yang dibutuhkan UMK dalam mengembangkan usahanya. Kesemuanya itu dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan antara UMK dengan usaha menengah dan besar (Hafsah, 2000).

Dari definisi kemitraan yang terkandung dalam UU Nomor 9 tentang Usaha Kecil tahun 1995 mengandung makna sebagai tanggung jawab moral. Pengusaha menengah dan besar untuk membimbing dan membina pengusaha UMK mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama. Filosofi hakiki dari kemitraan adalah kebersamaan dan pemerataan. Dengan demikian kemitraan akan selalu dibutuhkan selama tuntutan pemerataan belum teratasi. Di lain pihak kemitraan adalah suatu proses jangka panjang yang berubah secara dinamis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dari seluruh pelaku kemitraan. Melalui kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan UMK dapat meningkatkan produktivitas, pangsa pasar, menjamin pasokan bahan baku, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung resiko, dan distribusi pemasaran.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dari hasil analisis dengan menggunakan analisis uji beda rata-rata anova dan *Structural Equation Modeling* (SEM) semua variabel penyebab memberikan nilai yang positif dan berpengaruh nyata pada variabel akibat, ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Selain itu dari uji kesesuaian (*goodness of fit indices*) dapat menerima model yang dibentuk. Ini berarti bahwa semua variabel penelitian yang dilibatkan dalam analisis dapat dipertanggungjawabkan sebagai model bagi pengembangan UMK pangan di daerah penelitian. Untuk lebih mengembangkan UMK pangan ke arah yang lebih baik, iklim usaha perlu dibangun sekondusif mungkin yang akan memberi peluang UMK tersebut berkembang maju baik berupa regulasi dan deregulasi peraturan yang mendukung, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Di samping itu, pembinaan dan pelatihan hendaknya lebih memperhatikan kesesuaian dan kebutuhan pengusaha, agar UMK lebih merasakan manfaatnya. Kemitraan dengan usaha menengah dan besar perlu dibangun, agar UMK dapat menerima alih teknologi dan pengetahuan serta kemampuan manajerial yang diharapkan akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia UMK sehingga menjadi lebih profesional. Di samping itu peran usaha menengah dan besar sangat diharapkan dapat membantu permodalan yang dibutuhkan UMK dalam mengembangkan usahanya.

### **Daftar Pustaka**

- Berry, S. dan Brian Levy, 2001. *Indonesia's Small and Medium Size Exporters and Their Support Systems*, Policy Research Working Papers, No.1402, December, The Finance and Private Sector Development Division, World Bank, Washington, D.C.
- Bhargava, Ravi K., 1996. *Status of Rural Industrialization and the Role of the Khadi and Village Industri Commission*, makalah disampaikan dalam the Asia-Pasific Symposium on Rural Industrialization, Juli 16-18, Colombo, Sri Lanka.
- BPS Kota Palembang, 2005. Palembang dalam Angka.
- BPS, 2006, *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Tahun 2005*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Hafsah, M. Jafar, 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Hill, Hall, 1995. *Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia since 1970*. Oxford University Press, Singapore.
- Hu, Ming Wen and Chi Schive, 1996. The Market Shares of Small and Medium Scale Enterprises in Taiwan Manufacturing, *Asian Economic Journal*, 10 (2).
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2012, *Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010-2014*, Jakarta.
- Porter, Michael E., 2001. *Competitive Strategy*, The Pree Press, New York.
- Soewardi, Herman, 2001. *Roda Berputar Dunia Bergulir: Kognisi Baru tentang Timbul-Tenggelamnya Sivilisasi*, Bakti Mandiri, Bandung.
- Mubyarto, 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus, 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Salemba Empat, Jakarta.
- Utami, Hamidah Nayati, *et.al.*, 2006. Keberdayaan, Kemajuan dan Keberlanjutan Usaha Pengrajin di Jawa Timur, *Jurnal Arthavidya*, Terakreditasi, Fakultas Ekonomi Universitas Wisnu Wardhana Malang.
- Yusi, M. Syahirman, Imron Zahri, 2006. Kebijakan Pemberdayaan Industri Kecil Pangan dan Pengaruhnya terhadap Kemandirian Usaha di Sumatera Selatan. *Jurnal Arthavidya*, Terakreditasi, Fakultas Ekonomi Universitas Wisnu Wardhana Malang.